



MORATORIUM HOTEL DIBERLAKUKAN TERBATAS

Dewan Desak Perwal Ditarik

UMBULHARJO (MERAPI) - Kalangan DPRD Kota Yogyakarta mendesak Pemkot Yogyakarta menarik kembali Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 85 tahun 2018 yang menjadi dasar moratorium hotel terbatas untuk hotel baru bintang 4 dan 5 serta guest house. Pasalnya masih ada ada persoalan terkait hotel yang dikeluhkan masyarakat dan sumbangsih hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dinilai belum signifikan.

"Kami mendesak Pemkot Yogyakarta untuk menarik kembali Perwal 85/2018. Melakukan evaluasi dengan melibatkan komponen masyarakat, termasuk DPRD kota Yogyakarta," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta yang membicarakan perizinan, Nasrul Khoiri, Kamis (3/1).

Terkait keberadaan bandara baru dan potensi wisatawan bertambah yang menjadi salah satu pertimbangan IMB hotel bintang 4 da 5 serta guest house dibuka, pihaknya enggan berkomentar banyak. Pihaknya menekankan pada aspek penguatan evaluasi persoalan pembangunan hotel dan sumbangsih ke PAD, dahulu.

Meskipun pemkot mempertimbangkan beberapa aspek alasan menarik kembali perwal itu, tapi bila dirasakan dengan nurani jernih, lanjutnya masih terasa mengabaikan aspirasi masyarakat. "Terbitnya perwal ini menegaskan pemkot lebih condong kepada kepentingan investor," tegasnya.

Dia menyatakan sebelum mencabut moratorium hotel secara terbatas, seharusnya Pemkot Yogyakarta mempertimbangkan persoalan terkait hotel selama ini. Saat moratorium masih diberlakukan, masih ada investor yang melanggar aturan dengan sengaja menabrak atau mengakali aturan, sehingga menurunkan marwah wibawa Pemkot Yoga. Contoh kasus kos-kosan eksklusif di Jalan Ipda Tut Harsono yang dipromosikan dan beroperasi seperti hotel.

Di samping itu masih banyaknya masyarakat yang mengeluh dan mengadukan ke DPRD Kota Yogyakarta maupun ke Lembaga Ombudsman mengenai dampak pembangunan hotel atau hunian bertingkat yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan hidup.



MEDIKA TEL. 0274-241101

Salah satu bangunan hotel di Jalan Kusumanegara yang mangkrak beberapa tahun.

"Aspirasi masyarakat tersebut selalu montok pada jawaban pemkot yang normatif dan tidak solutif. Dari sisi PAD belum ada bukti empirik sumbangsih hotel terhadap peningkatan signifikan ke PAD," papar Nasrul.

Dia menilai salah satu sebab belum adanya bukti empirik sumbangsih PAD dari hotel itu adalah pemkot belum menyiapkan sistem yang integral atas potensi PAD dari pajak hotel. Selain itu Pemkot Yogyakarta dianggap tidak pernah melibatkan DPRD Kota Yogyakarta dalam mempersiapkan kebijakan pencabutan moratorium hotel bintang 4 dan 5 serta guest house.

(Tri)-a
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi

1. **Din. PM dan Perizinan**
2.
3.
4.
5.

✓ **Netral**
 ✓ **Segera**
 ✓ **Untuk diketahui**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005